



**News Title :** Badan Pengawas Indonesia Mempertimbangkan Perubahan Pajak Berganda untuk Mata Uang Digital: Laporan

**Media Name :** reviewbekasi.com

**Journalist :** -

**Publish Date :** 07 March 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :** 1

**News Value :** 1,500,000

**Resources :** Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti)

**Ads Value :** 500,000

**Section/Rubrication :** Top News

**Topic :** Pajak Kripto

TOP NEWS

# Badan Pengawas Indonesia Mempertimbangkan Perubahan Pajak Berganda untuk Mata Uang Digital: Laporan

Arzu · 44 menit ago · 2 min read



Badan pengawas komoditas Indonesia ingin mengubah status peraturan pajak mata uang digital sebelum meningkatkan tingkat adopsi di Asia Tenggara.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPT) meminta Kementerian Keuangan RI mengevaluasi perpajakan mata uang digital yang berlaku saat ini agar mencerminkan digitalisasi. Laporan.

Pejabat Bappebti bersikeras untuk mengurangi beban pajak bagi penyedia layanan dan pedagang mata uang virtual di negara tersebut. Setiap transaksi mata uang virtual saat ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% selain pajak penghasilan sebesar 0,1% yang sudah ada.

Pihak berwenang Indonesia memberlakukan persyaratan PPN pada pertengahan tahun 2022 setelah beberapa bursa terkemuka di negara tersebut meledak. Namun, sesuai dengan hukum setempat, rezim pajak diperkirakan akan dievaluasi setiap tahun untuk menentukan kesesuaian ekonominya, sehingga mendorong Paus untuk melakukan evaluasi.

"Evaluasi perlu dilakukan karena peraturan ini sudah berlaku lebih dari setahun," bunyi pernyataan tersebut. "Biasanya, pajak dihitung setiap tahun."

Tirta Karma Senjaya, Kepala Bappebti, sebuah biro pengembangan pasar, mencatat bahwa penilaian ulang terhadap sistem perpajakan diperlukan mengingat pentingnya peran kelas properti dalam perekonomian lokal.

"Karena nantinya cryptocurrency akan menjadi bagian dari sektor keuangan," kata Senjaya dalam acara keuangan di Jakarta. "Kami menunggu komitmen Direktorat Pajak untuk menilai pajak-pajak tersebut."

Alasan lain untuk menilai kembali perpajakan adalah klasifikasi mata uang digital oleh otoritas Indonesia sebagai sekuritas, bukan obligasi. Papepty diperkirakan akan menyerahkan kendali regulasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah langkah yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.

Kombinasi PPN dan pajak penghasilan atas aset digital telah menambah sedikit keuntungan bagi pemerintah. Pada bulan Januari saja, pendapatan pajak mata uang digital melampaui \$2,3 juta di tengah meningkatnya metrik transaksi di negara tersebut.

**READ Bali menjadi negara pertama di Indonesia yang membebaskan segregasi bagi wisatawan asing yang divaksinasi - Komunitas**

**Menurunkan beban pajak namun memperketat kendali**

Ketika Bappebti berupaya mengurangi beban pajak terhadap mata uang digital, regulator lain juga memperketat cengkramannya pada ekosistem aset digital lokal.

Regulator di Indonesia, yang masih belum pulih dari ledakan perusahaan aset digital terkemuka, telah memperkenalkan peraturan baru untuk melindungi investor. Aturan baru tersebut mewajibkan dua pertiga pengurus penyedia layanan aset digital adalah warga negara Indonesia.

Regulator di Indonesia telah menciptakan bursa mata uang digital nasional, sekaligus mewajibkan semua operator bursa untuk mengandalkan layanan pihak ketiga untuk menyimpan dana nasabah.